



Nama Formulir:

**Lembar  
Pengesahan  
Karya Ilmiah**

No.

Dikosongkan \*(diisi admin  
prodi)

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Dr. phil. Shiskha Prabawaningtyas  
Jabatan Ketua Program Studi  
Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional  
NIP 209010159

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul: Soft Power Azerbaijan dalam Konflik Nagorno Karabakh

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap Gilang M. Pangastomo  
Jenjang Strata 2  
Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional  
NIM 220131009

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 30 April 2024

Penelaah,

Dr. phil. Shiskha Prabawaningtyas

NIP: 209010159

# ***Soft Power Azerbaijan dalam Konflik Nagorno Karabakh***

## **1. Pendahuluan**

Nagorno Karabakh merupakan salah satu tempat dimana konflik peninggalan Uni Soviet masih terjadi. Wilayah yang dihuni mayoritas etnis Armenia ini sejak masa kekaisaran Rusia, merupakan bagian dari Azerbaijan. Secara etnisitas, Armenia dan Azerbaijan merupakan etnis yang sangat berbeda jauh. Armenia yang secara historis merupakan penganut kristiani dan lebih dekat dengan budaya eropa. Sedangkan etnis Azeri yang mayoritas berbudaya Islam dan merupakan bagian dari etnis Turkic yang tersebar dari Siberia hingga Turki sehingga lebih dekat dengan budaya asia. Kedua etnis yang berbeda ini bercampur di wilayah Nagorno Karabakh sehingga ketika Uni Soviet runtuh dan setiap negara-negara bagian memerdekakan diri, perselisihan timbul akibat adanya tumpang tindih perebutan wilayah.

Perselisihan dimulai pada masa-masa akhir Uni Soviet. Pada tahun 1988, etnis Armenia di Nagorno Karabakh menyelenggarakan referendum yang meminta Uni Soviet memindahkan wilayah Oblast Otonom Nagorno-Karabakh dari Azerbaijan ke Armenia. Kemudian, secara sepihak parlemen Oblast Otonom Nagorno-Karabakh memutuskan untuk bergabung dengan Armenia. Tuntutan tersebut dimulai dengan cara yang relatif damai. Sebagai tanggapan atas referendum tersebut Azerbaijan mengeluarkan Resolusi No. 279-XII tentang Penghapusan Daerah Otonomi Nagorno-Karabakh yang kemudian direspon dengan referendum kemerdekaan oleh etnis Armenia di Nagorno Karabakh pada 10 Desember 1991. Referendum tersebut diikuti oleh 82,2% penduduk dengan mayoritas (99,89%) memilih merdeka. Walaupun pemungutan suara dilakukan dengan cara yang relatif damai, namun setelah keruntuhan Uni Soviet pada 26 Desember 1991, secara bertahap perselisihan kedua etnis berkembang menjadi konflik yang semakin sengit. Kedua belah pihak saling mengklaim bahwa pembersihan etnis sedang dilakukan yang pada akhirnya memicu terjadinya perang terbuka yaitu Perang Nagorno Karabakh Pertama.

Setelah 6 tahun perang intensif antara kedua negara, perang Nagorno Karabakh berakhir melalui Protokol Bishkek. Pada 5 Mei 1994, kedua belah pihak menyetujui kesepakatan damai

yang dimediasi oleh Rusia. Walaupun perjanjian ini menandai berakhirnya perang di Nagorno Karabakh namun tidak dapat sepenuhnya menghentikan konflik di wilayah ini. Konflik sekala kecil masih terus terjadi hingga meletus Perang Nagorno Karabakh Kedua pada tahun 2020. Perang Nagorno Karabakh Pertama menyebabkan 20% wilayah Azerbaijan dikuasai oleh Armenia dan menyebabkan sekitar 800.000 ribu etnis Azeri mengungsi ke wilayah Azerbaijan yang lebih aman (Center for Preventive Action, 2024). Etnis Armenia kemudian mendirikan Republik Artsakh yang hanya diakui oleh Armenia. Dunia internasional mengakui wilayah Nagorno Karabakh sebagai wilayah Azerbaijan.

Walaupun pengambilan alih Nagorno Karabakh dilakukan utamanya melalui tindakan koersif atau *hard power*. Namun, kedua negara termasuk Azerbaijan juga melakukan tindakan *soft power* untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara lain sebagai pengakuan atas pihak yang menguasai Nagorno Karabakh. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan *soft power* Azerbaijan dalam menghadapi konflik Nagorno Karabakh dengan menggunakan metode deskripsi eksploratif dengan bersumber pada pemberitaan di media digital maupun ulasan terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

## 2. Dasar teori

Soft power bertumpu pada kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain. Nye (2004) mendefinisikan soft power sebagai kemampuan suatu negara atau entitas untuk mempengaruhi negara lain melalui cara-cara non-koersif seperti budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri untuk membentuk preferensi negara lain. Nye (2004) membandingkan *soft power* dengan *hard power*, yang mengandalkan kekuatan militer dan sanksi ekonomi sedangkan *soft power* adalah tentang persuasi dan ketertarikan, bukan pemaksaan. Nye (2004) berpendapat bahwa *soft power* suatu negara dapat berasal dari budayanya (termasuk nilai-nilai politik, musik, film, dan sastra), nilai-nilai politiknya (seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan individu), dan kebijakan luar negerinya (seperti dukungan terhadap negara lain). Negara-negara dengan *soft power* yang signifikan seringkali mampu mencapai tujuan mereka dalam politik global tanpa menggunakan kekerasan atau tekanan ekonomi.

Lebih lanjut Nye (2004) menjelaskan bahwa *soft power* merupakan kemampuan untuk mempengaruhi preferensi yang cenderung dikaitkan dengan kemampuan tidak berwujud seperti budaya yang menarik, nilai-nilai politik dan ideologi, institusi, dan kebijakan yang dipandang legal dan berpengaruh. Oleh sebab itu, untuk mempengaruhi preferensi suatu negara *soft power* cenderung mengandalkan kombinasi antara bujukan persuasif dan daya tarik suatu

negara yang pada akhirnya negara yang terpengaruh akan setuju terhadap negara yang mempengaruhi tanpa adanya ancaman atau imbal balik yang eksplisit. *Soft power* berarti membuat suatu negara melakukan hal yang diinginkan negara yang mempengaruhi melalui kooptasi, bukan paksaan atau tindakan agresif koersif.

### **3. Pembahasan**

Pada tahun 1920-an, Partai Komunis Soviet menciptakan struktur negara etno-federal Uni Soviet. Tujuan penggunaan etnisitas sebagai dasar pembentukan negara adalah untuk membujuk kelompok etnis minoritas untuk menerima komunisme. Kebijakan ini berbanding terbalik dimana populasi non-Rusia tertindas di masa kekuasaan tsar (Gorenburg, 2003). Selama tahun-tahun awal pembentukan negara Soviet, kebijakan pemerintah terhadap etnis minoritas adalah dengan memberikan kesempatan untuk mendirikan otonomi dengan memastikan bahwa otonomi tersebut akan digunakan untuk membentuk pemerintahan sosialis pada masing-masing negara bagian (Nahaylo dan Swoboda, 1990). Namun, sentralisasi yang kuat dari Uni Soviet menjadi penyebab ketidakpuasan dengan pemerintahan Soviet di antara penduduk tituler daerah. Gerakan-gerakan nasionalis yang muncul selama *Perestroika* menciptakan ideologi nasionalis baru yang berdasarkan kepentingan etnis, terutama etnis non-Rusia. Lebih lanjut, kelompok nasionalis yang paling radikal menginginkan tidak hanya diberikan otonomi politik dan kebangkitan budaya namun juga menyerukan kemerdekaan nasional.

Dalam menggambarkan sejarah kelompok etnis, kubu nasionalis sering menyebut diri mereka sebagai penduduk asli tanah yang saat ini ditempati yang kemudian membingkai etnis mereka sebagai penduduk asli sedangkan kelompok yang lain, terutama Rusia, digambarkan sebagai migran yang relatif baru datang. Dengan berargumen bahwa kelompok mereka telah ada di sana terlebih dahulu, kubu nasionalis berusaha untuk meyakinkan kelompok etnis mereka yang mayoritas bahwa mereka memiliki klaim yang lebih kuat terhadap wilayah tersebut daripada kelompok etnis lain yang tinggal dalam wilayah yang sama. Kubu nasionalis berpendapat bahwa ini adalah satu-satunya tanah yang dapat mereka klaim sebagai milik mereka dan dimana mereka dapat memenuhi aspirasi mereka untuk membentuk suatu negara yang sesuai dengan identitas etnis.

Klaim tumpang tindih atas wilayah ini yang terjadi di Nagorno Karabakh. Nagorno Karabakh bukanlah wilayah yang homogen. Wilayah ini merupakan pertemuan antara etnis Armenia dengan etnis Azerbaijan sejak berabad-abad lalu. Sehingga dengan deklarasi

kemerdekaan Republik Armenia dan Republik Azerbaijan, kemudian ditambah dengan bubarnya Uni Soviet maka terjadi anarki di wilayah Nagorno Karabakh. Wilayah Nagorno Karabakh yang secara *de jure* merupakan bagian dari wilayah Azerbaijan namun dihuni oleh mayoritas etnis Armenia. Atas dasar nasionalisme etnis tersebut etnis Armenia di Nagorno Karabakh mendeklarasikan berdirinya Republik Artsakh yang didukung oleh Republik Armenia. Selama bertahun-tahun, kedua negara telah terlibat dalam pertempuran dan negosiasi damai, namun eskalasi kekerasan secara berkala masih terjadi. Konflik ini tidak hanya melibatkan Armenia dan Azerbaijan sebagai aktor utama, namun juga terdapat beberapa pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat:

#### 1. Armenia dan Azerbaijan

Konflik terutama melibatkan dua bekas republik Soviet ini. Armenia mendukung populasi etnis Armenia di Nagorno-Karabakh, sementara Azerbaijan berusaha merebut kembali dan mengendalikan wilayah tersebut, yang secara internasional diakui sebagai bagian dari wilayahnya.

#### 2. Etnis Armenia di Nagorno-Karabakh

Populasi etnis Armenia di Nagorno-Karabakh berusaha melepaskan diri dari Azerbaijan dan membangun negara independen (Republik Artsakh) atau reunifikasi dengan Armenia karena ikatan budaya, sejarah, dan etnis. Secara *de facto* hanya Republik Armenia yang mengakui kedaulatan Republik Artsakh dan pada kenyataannya republik ini sangat bergantung pada bantuan dari Republik Armenia.

#### 3. Uni Soviet/Rusia

Ketika konflik berlangsung pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, di masa-masa akhir Uni Soviet dan sedang dalam proses pembubaran. Pemerintah Soviet awalnya mencoba untuk memediasi konflik tetapi tidak dapat mencegah kekerasan. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia terlibat dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan terus memainkan peran penting di wilayah tersebut karena alasan historis, geopolitik, dan ekonomi.

#### 4. Turki

Turki secara historis mendukung Azerbaijan dan memiliki hubungan budaya dan etnis yang erat dengan negara tersebut. Selama Perang Nagorno-Karabakh, Turki memberikan dukungan militer dan diplomatik kepada Azerbaijan.

#### 5. Mediator Internasional

Kelompok OSCE Minsk, yang diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1992 untuk memediasi konflik. Kelompok Minsk telah terlibat

dalam negosiasi damai dan memfasilitasi dialog antara Armenia dan Azerbaijan. Amerika Serikat dan Prancis memiliki diaspora etnis Armenia yang signifikan. Di Amerika Serikat, baik ANCA (Armenian National Committee of America) maupun Armenian Assembly of America sering melakukan lobi ke Amerika Serikat untuk mengakui kemerdekaan Nagorno Karabakh dan untuk meningkatkan bantuan ke wilayah tersebut (Gregg, 2002). Di Prancis, komunitas Armenia yang terbesar di Eropa dengan lebih dari setengah juta warga negara Prancis-Armenia telah secara aktif meningkatkan kerja sama politik, ekonomi, dan budaya dan membantu memediasi resolusi untuk konflik di Artsakh (Halton, 2018).

Dalam mendapatkan kembali wilayah Nagorno Karabakh, Azerbaijan menggunakan beberapa kombinasi taktik antara *hard power* dan *soft power*. Tindakan *hard power* dilakukan antara lain melalui operasi militer. Setelah Protokol Bishkek disetujui, eskalasi skala kecil kerap dilakukan Azerbaijan disepanjang garis kontak. Puncaknya adalah perang 44 hari pada tahun 2020 atau Perang Nagorno Karabakh Kedua yang berhasil mengambil sebagian besar wilayah yang direbut oleh Armenia pada perang pertama. Selain upaya *hard power*, strategi *soft power* juga dilakukan oleh Azerbaijan yang antara lain bertujuan untuk mempengaruhi opini internasional, menggalang dukungan, dan membentuk persepsi mengenai konflik tersebut.

Upaya *soft power* ini merupakan pelengkap bagi tindakan *hard power* Azerbaijan untuk mencapai tujuan merebut kembali Nagorno Karabakh. Upaya *soft power* dapat memainkan peran penting bagi Azerbaijan dalam melengkapi upaya militer dan mencapai tujuan diplomatiknya. Dalam artikel ini akan dibahas beberapa upaya *soft power* Azerbaijan berupa diplomasi terhadap negara-negara yang tergabung dalam Minsk Group yaitu Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia. Diplomasi yang dilakukan oleh Azerbaijan merupakan tindakan *soft power* yang berupa kebijakan luar negeri melalui kooptasi, bukan paksaan atau tindakan koersif untuk mempengaruhi negara-negara lain dalam upaya mendukung kembalinya Nagorno Karabakh ke tangan Azerbaijan.

### **3.1 Diplomasi Kaviar**

Azerbaijan terlibat dalam upaya diplomatik ekstensif untuk menggalang dukungan internasional untuk mendapatkan pengakuan atas Nagorno-Karabakh. Upaya ini mencakup melakukan lobi, negosiasi diplomatik, dan partisipasi dalam forum internasional untuk mendapatkan dukungan dan mengadvokasi sikap negara tersebut terhadap integritas wilayah Azerbaijan. Upaya diplomasi yang dilakukan Azerbaijan sebelum terjadinya perang Nagorno

Karabakh Kedua ini memberikan konteks penting untuk memahami reaksi di Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap tindakan Azerbaijan dalam Perang Nagorno Karabakh Kedua, yang terlihat bertentangan dengan sikap menolak yang diambil para pejabat AS ketika Rusia melakukan invasi atas Ukraina.

Salah satu upaya diplomasi yang dilakukan Azerbaijan dan cenderung kontroversial adalah Diplomasi kaviar (Freeman & DerSimonian, 2023). Diplomasi ini merupakan strategi lobi Azerbaijan, yang terdiri dari undangan mahal untuk politisi luar negeri dan karyawan organisasi internasional ke Azerbaijan dengan segala biaya ditanggung oleh negara tuan rumah hingga pemberian-pemberian barang-barang mahal dan mewah (European Stability Initiative, 2012). Dalam tradisi Azerbaijan, Kaviar melambangkan hadiah mewah dan menyiratkan harapan. Tindakan memberikan hadiah menciptakan harapan timbal balik, baik melalui permintaan langsung atau melalui persetujuan secara tidak langsung yang dibangun dari waktu ke waktu (Canbäck, 2024). Diplomasi kaviar pertama kali digunakan dalam sebuah laporan oleh *European Stability Initiative* (ESI) tahun 2012 yang menjelaskan bagaimana upaya Azerbaijan membungkam Dewan Eropa dengan memberikan fasilitas dan hadiah mewah bagi para anggota dewan.

Di Amerika Serikat, pemerintah Azerbaijan telah menghabiskan lebih dari \$7 juta untuk melakukan lobi dan upaya persuasif Sejak tahun 2015 (Freeman & DerSimonian, 2023). Azerbaijan, salah satunya melalui BGR Government Affairs, sebuah perusahaan pelobi dan komunikasi yang berbasis di Washington, D.C telah melakukan upaya advokasi yang gencar untuk kepentingan Baku, termasuk bantuan militer yang berkelanjutan kepada Azerbaijan setelah perang Nagorno-Karabakh Kedua pada tahun 2020. Pengaruh Azerbaijan di AS juga banyak dibantu oleh Israel. Azerbaijan menggunakan bantuan Ezra Friedlander seorang Israel-Amerika sebagai pelobi untuk memuluskan kepentingannya. Beberapa upaya Azerbaijan tersebut merupakan sebagian dari diplomasi yang diketahui publik dan mengingat sejarah Azerbaijan sebagai negara otoritarian terdapat kemungkinan besar tindakan diplomasi belum semuanya terungkap.

### **3.2 Diplomasi Budaya dan Pemberian Bantuan**

Dari segi budaya, Azerbaijan memanfaatkan kekayaan warisan budaya dan pencapaian seninya untuk menunjukkan identitasnya dan mempromosikan citranya di luar negeri. Acara, pameran, dan pertukaran budaya berfungsi sebagai platform untuk menyoroti sejarah, tradisi, dan kontribusi Azerbaijan terhadap budaya global, menumbuhkan niat baik dan persepsi positif

di kalangan masyarakat internasional. Azerbaijan merupakan bagian dari negara-negara Turkik yang terbentang dari Turki hingga Siberia. Hubungan antara Turki dan Azerbaijan adalah contoh unik dalam politik global dan terus berkembang berdasarkan moto umum: "satu bangsa, dua negara" (Gafarlı, 2020). Selain sejarah, kedua negara berbagi nilai-nilai sosial, bahasa dan agama yang sama, selain sejarah. Dukungan Turki diberikan tidak hanya dalam bentuk finansial namun juga diplomasi dan militer (Umarah & Muhammad, 2023). Upaya lain yang dilakukan Azerbaijan adalah dengan menyelenggarakan even-even bertaraf internasional. Selama beberapa tahun terakhir, Baku telah menjadi tuan rumah sejumlah acara olahraga dan hiburan skala internasional seperti *Eurovision Song Festival*, *First European Games*, *Islamic Solidarity Games*, *Grand Prix Formula 1*, dan even-even lainnya. Dengan penyelenggaraan even-even internasional ini, Azerbaijan mencoba untuk menunjukkan citra positif dan modern kepada dunia internasional dengan menciptakan koneksi dengan para pemimpin global di bidang olahraga dan budaya.

Salah satu upaya yang dilakukan Azerbaijan adalah memberikan citra sebagai negara yang toleran. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, yayasan milik pemerintah yang berbasis di Azerbaijan telah membantu sebagian dari biaya restorasi sebuah gereja kuno di Prancis (Gente, 2013). Proyek ini secara luas dipandang sebagai bagian dari upaya *soft power* Azerbaijan di Prancis yang bertujuan untuk menunjukkan niat baik dan melawan publisitas buruk yang timbul dari catatan pelanggaran hak asasi manusia di Baku. Sebagai kekuatan utama Eropa sekaligus bagian dari Minsk Group, Prancis merupakan target utama diplomasi ini. Salah satu alasannya bahwa banyaknya diaspora Armenia di negara ini dan untuk membendung arus lobi-lobi Armenia, yang merupakan lawan Azerbaijan dalam merebut Nagorno Karabakh.

Upaya lain yang ditempuh Azerbaijan pada tahun 2007 melalui Heydar Aliyev Fund dengan memberikan sejumlah uang yang tidak diungkapkan untuk merestorasi karya-karya seni yang tersimpan di Istana Versailles. Dua tahun berselang, Azerbaijan mengucurkan memberikan hadiah sebesar 40.000 euro untuk restorasi tiga jendela kaca patri di Cathédrale de Notre Dame di Strasbourg. Upaya berikutnya dengan memberikan hadiah sebesar 1 juta euro kepada Museum Louvre untuk mendanai pelaksanaan pameran budaya keliling yang mewah (Gente, 2013). Upaya ini dikampanyekan oleh Azerbaijan untuk mempromosikan citra toleransi, khususnya toleransi antar agama.



### 3.3 Diplomasi Melalui Media Digital

Media Digital merupakan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang dimaksudkan kepada audiens dalam jumlah besar dan dapat disampaikan di berbagai saluran elektronik dalam waktu yang relatif singkat (Damuyakor, 2020). Penggunaan media baru yang meluas seperti *smartphone*, jejaring sosial, dan alat berbasis internet telah membuat diplomasi menjadi kegiatan yang dapat dilakukan melalui media digital (Liaw, et. al, 2020). Diplomasi dengan media digital dipandang sebagai hasil dari transisi dan diakui sebagai konsep diplomasi baru yang mendorong pemimpin negara bagian dan diplomat di era ini untuk mengembangkan dan mempelajari keterampilan baru dalam penggunaan teknologi informasi.

Pemerintah Azerbaijan menggunakan inisiatif diplomasi melalui media digital untuk mengkomunikasikan narasinya mengenai konflik Nagorno-Karabakh kepada khalayak global. Hal ini mencakup penyebaran informasi melalui berbagai saluran, termasuk media, platform media sosial, dan kampanye hubungan masyarakat, untuk membentuk opini internasional dan menggalang simpati terhadap perjuangannya. Azerbaijan memanfaatkan platform media untuk menyebarkan informasi, melawan disinformasi, dan membentuk narasi seputar konflik Nagorno-Karabakh. Dengan memaparkan perspektifnya mengenai konflik dan menyoroti contoh-contoh agresi Armenia atau pelanggaran hak asasi manusia, Azerbaijan berupaya mendapatkan simpati dan dukungan dari komunitas internasional. Salah satu keuntungan Azerbaijan adalah bahwa wilayah Nagorno Karabakh diakui dunia internasional sebagai bagian integral wilayah Azerbaijan sehingga Azerbaijan berusaha untuk mencitrakan bahwa upaya koersif di Nagorno Karabakh merupakan tindakan untuk mempertahankan kedaulatan.

Azerbaijan melakukan beberapa tindakan untuk menciptakan persepsi positif seperti membayar lebih dari \$ 1,25 juta kepada konsultan hubungan masyarakat selama lima tahun terakhir untuk meningkatkan citra Azerbaijan di media dan melobi anggota Kongres AS (Gulesserian & Philips, 2020). Melakukan mobilisasi yang melibatkan orang-orang di Azerbaijan untuk memberikan komentar yang mendukung pada halaman-halaman facebook media internasional dan lokal, tokoh-tokoh publik termasuk oposisi, dan partai yang berkuasa di Azerbaijan (Gulesserian & Philips, 2020). Di sisi lain, Rusia melihat pentingnya Azerbaijan sehingga mengikutsertakannya dalam inisiatif multilateral yang dipromosikan oleh Rusia karena melihat semakin pentingnya Azerbaijan secara geopolitik bagi negara barat dan Tiongkok (Umarach & Muhammad, 2023). Rusia juga mengeluarkan pedoman yang menekankan agar mbingkai narasi Nagorno-Karabakh dengan penggambaran Armenia dan

mitra baratnya sebagai pihak utama yang bertanggungjawab terhadap krisis di Nagorno Karabakh (Hassassian, 2023). Rusia melakukan mediasi dan selalu bertindak sebagai pihak yang menengahi penyelesaian konflik di Nagorno Karabakh. Tindakan diam Moskow ketika Azerbaijan menluncurkan perang Nagorno Karabakh Kedua merupakan suatu bentuk dukungan terhadap Azerbaijan.

*Soft power* yang dilakukan oleh Azerbaijan dalam upaya merebut kembali Nagorno-Karabakh bertujuan untuk mempengaruhi persepsi, menggalang dukungan, dan mencapai tujuan diplomatiknya bersamaan dengan operasi militernya. Meskipun *soft power* saja mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan konflik, hal ini memainkan peran penting dalam melengkapi strategi Azerbaijan yang lebih luas dan membentuk wacana internasional seputar konflik Nagorno-Karabakh. *Soft Power* yang dilakukan oleh Azerbaijan bertumpu pada melakukan lobi-lobi terhadap pihak yang berkepentingan, pemberian bantuan, dan intervensi opini di media digital. Upaya ini bertujuan untuk menunjukkan Azerbaijan sebagai negara demokratis, mempromosikan sektor energinya, mencapai resolusi yang menguntungkan untuk konflik Nagorno-Karabakh dan membatalkan penggunaan *Section 907* dari Undang-Undang Dukungan Kebebasan (*the Freedom Support Act*) pada tahun 1992 dalam menanggapi blokade Azerbaijan dari Nagorno Karabakh dan Armenia (Sargsyan et. al, 2018). Upaya lobi ini tentu membutuhkan dana yang cukup banyak, lebih dari \$ 150 miliar pendapatan minyak dan gas selama 10 tahun terakhir yang diperoleh menciptakan peluang bagi Azerbaijan untuk berinvestasi dalam melobi baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mempengaruhi opini dan persepsi dunia internasional. Para elit dalam pemerintahan membayar untuk upaya melobi dengan tujuan membungkam sentimen negatif dan oposisi politik di dalam negeri serta suara-suara kritis yang datang dari luar negeri (Ibadoghlu, 2020).

#### **4. Kesimpulan**

Walaupun Nye (2004) mengutarakan bahwa tindakan *soft power* tidak seharusnya menggunakan kekuatan ekonomi untuk membayar suatu negara agar terpengaruh, namun kekuatan ekonomi menjadi salah satu alat bagi tindakan diplomasi yang tidak hanya dilakukan oleh Azerbaijan namun juga negara-negara lainnya. Diplomasi yang dilakukan Azerbaijan didanai dari sumber daya alam berupa Minyak Bumi dan Gas. Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari sumber daya alam tersebut diubah menjadi *soft power* dalam bentuk diplomasi salah satunya adalah diplomasi kaviar, pemberian bantuan, dan penguatan pengaruh di media digital. Pengaruh tersebut muncul ketika negara-negara terutama negara anggota Minsk Group

lebih banyak ditunjukkan dengan sikap diam ketika terjadi Perang Nagorno Karabakh Kedua. Puncaknya adalah hilangnya legitimasi Minsk Group, ketika solusi militer menggantikan solusi diplomatik yang berakhir dengan tindakan koersif Azerbaijan. Hal tersebut merupakan lampu hijau bagi tindakan koersif Azerbaijan untuk mendapatkan kembali Nagorno Karabakh. Azerbaijan dapat mengambil alih Nagorno Karabakh dalam 44 hari, memaksa Armenia ke meja perundingan dan dibubarkannya Republik Artsakh.

## Referensi

Canbäck, R (2024). *Azerbaijan's New Faces of Caviar Diplomacy*.

<https://www.ispionline.it/en/publication/azerbaijans-new-faces-of-caviar-diplomacy-162604>. (Diakses pada 27 April 2024).

Center for Preventive Action (2024). *Nagorno-Karabakh Conflict*.

<https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/nagorno-karabakh-conflict> (Diakses pada 27 April 2024)

Cornell, S. E. (1998). Turkey And The Conflict In Nagorno Karabakh: A Delicate Balance. *Middle Eastern Studies*, 34(1), 51–72.

<https://doi.org/10.1080/00263209808701209>

Czachor, R. (2017). The Nagorno-Karabakh Conflict As A Specific Example Of Asymmetric Conflict. *Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces*. 185. 17-31. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5119>

Demuyakor, J. (2020). Opportunities and Challenges of Digital Media: A Comprehensive Literature Review of Ghana. *Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities Vol 2: Issue II Apr-Jun 2020*.

European Stability Initiative (2012). *Caviar Diplomacy, How Azerbaijan silenced the Council of Europe*. [http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=156&document\\_ID=131](http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=156&document_ID=131) (Diakses pada 27 April 2024)

Federica B. (2022). *Applying cultural diplomacy to overcome political distress: The case of Azerbaijani - French relations*. Politicon.

<https://www.politicon.co/en/essays/153/applying-cultural-diplomacy-to-overcome-political-distress-the-case-of-azerbaijani-french-relations> (Diakses pada 27 April 2024).

Freeman, B. & DerSimonian, A. (2023). *The Lobbying Battle for Nagorno-Karabakh*.

<https://quincyinst.org/research/the-lobbying-battle-for-nagorno-karabakh/#executive-summary> (Diakses pada 27 April 2024)

Gafarlı, T. (2020). *One nation, Two States: Turkey's Stance on the Recent Escalation between Armenia and Azerbaijan*. TRT World Research Center.

<https://researchcentre.trtworld.com/wp-content/uploads/2020/11/Turkey-Azerbaijan-Armenia.pdf> (Diakses pada 27 April 2024).

- Gente, R (2013). *Azerbaijan: Baku Pursues Cultural Diplomacy in France*.  
<https://eurasianet.org/azerbaijan-baku-pursues-cultural-diplomacy-in-france>. (Diakses pada 27 April 2024).
- Gorenburg, D. P. (2003). *Minority Ethnic Mobilization in the Russian Federation*.  
Cambridge: Cambridge University Press.
- Gregg, H. S. (2002). *Divided They Conquer: The Success of Armenian Ethnic Lobbies in the United States. Working paper #13 MIT Libraries*.  
<https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/97604>
- Gulesserian, L & Philips, D. L. (2020). *The Media War By Azerbaijan And Turkey Against Armenia And Nagorno-Karabakh*. <https://www.humanrightscolumbia.org/news/media-war-azerbaijan-and-turkey-against-armenia-and-nagorno-karabakh>. (Diakses pada 27 April 2024).
- Halton, D. (2018). *The French Connection*. <https://agbu.org/peoples-victory/french-connection> (Diakses pada 28 April 2024).
- Hassassian, A. (2023). *Kremlin Set Up Guidelines For Media Coverage Of Karabakh Crisis*.  
<https://www.civilnet.am/en/news/751212/kremlin-set-up-guidelines-for-media-coverage-of-karabakh-crisis/> (Diakses pada 27 April 2024).
- Ibadoghlu, G. (2020). *The Empty Bucket Of The State Oil Fund Of Azerbaijan : Profit And Profiteering. Crude Accountability*. [https://crudeaccountability.org/wp-content/uploads/The\\_Empty\\_Bucket\\_report\\_web.pdf](https://crudeaccountability.org/wp-content/uploads/The_Empty_Bucket_report_web.pdf) (Diakses pada 28 April 2024)
- Liaw, J. et. al. (2020). *Digital Diplomacy: The Role Of Social Media. Solid State Technology. Volume 63 Issue 6 2020*.
- Sargsyan, S. et. al (2018). *Lobby for Aliyev by Aliyev, 2005–2018*.  
<https://medium.com/@517design/lobby-for-aliyev-by-aliyev-2005-2018-6a39d5b5c79>  
(Diakses pada 28 April 2024)
- Nahaylo, B. & Swoboda, V. (1990) *Soviet Disunion: A History of the Nationalities Problem in the USSR*. New York: Free Press.
- Nye, J. S., Jr. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs Books

Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94-109.

<https://doi.org/10.1177/0002716207311699>

Tase, P. (2023). *The Dynamics Of Public Diplomacy: The Case Of Azerbaijan*.

<https://www.azernews.az/nation/206076.html> (Diakses pada 27 April 2024).

Umarach, M. S., & Muhammad, A. (2023). Azerbaijan's Strategy to Win the Conflict over the Nagorno-Karabakh Territory with Armenia in 2020. *Journal of Islamic World and Politics*, 7(1), 119–128. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v7i1.49>